

SKRIPSI

**PENGARUH ENTITAS GEREJA TORAJA TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT TORAJA UTARA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:

GARE'GE' ARUNG ALLO

E041181319

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH ENTITAS GEREJA TORAJA TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT TORAJA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



OLEH:

GARE'GE' ARUNG ALLO E041181319

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH ENTITAS GEREJA TORAJA TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT TORAJA UTARA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

GARE'GE' ARUNG ALLO

E041181319

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal :, 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 197912182008122002


Ummi Suci Fathia B., S.IP., M.IP
NIP.199205022019044001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Dr. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PENGARUH ENTITAS GEREJA TORAJA TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT TORAJA UTARA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

GARE'GE' ARUNG ALLO

E041181319

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.

(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.

(.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S.IP., M.A.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gare'ge Arung Allo

NIM : E041181319

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Entitas Gereja Toraja Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Toraja Utara" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023



GARE'GE ARUNG ALLO

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Entitas Gereja Toraja Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Toraja Utara”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat wajib bagi mahasiswa S1 untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis. Ibunda tercinta penulis Yossapin Arung Allo dan Ayahanda Rante Merrambu yang senantiasa memberikan doa, semangat, bimbingan dan arahan serta kasih sayang yang tentunya selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing utama serta Penasehat Akademik (PA) dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing pedamping penulis yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Penulis menyadari selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali hambatan yang penulis alami. Namun, atas berkat bantuan doa dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu,

penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Periode 2022-2026 beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku mantan Dekan FISIP UNHAS dan Dekan FISIP UNHAS Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana

Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Bapak Haryanto, S.IP, M.A, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kepada keluarga besar GAMARA UNHAS yang telah menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa Toraja dalam lingkup Universitas Hasanuddin.
7. Kepada keluarga besar HIMAPOL FISIP UNHAS yang telah menumbuhkan karakter akan pentingnya menanamkan nilai-nilai kemahasiswaan serta pemahaman berorganisasi yang baik.
8. Kepada keluarga besar PMKO FISIP UNHAS yang telah menjadi wadah persekutuan, dan memberikan pengalaman berorganisasi selama berproses didalamnya.
9. Kepada teman-teman Revolusi 2018 yang telah kebersamai penulis dalam segala hal sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
10. Kepada saudara-saudaraku lingkaran setan, Agung, Echo, Uga', Aan dan Azril yang telah memberikan makna kebersamaan sedari awal penyambutan maba di Baruga hingga sekarang.

11. Kepada sahabat-sahabat RBT yang selalu mengisi waktu senggang dengan menemani, memberikan hiburan dan bantuan kepada penulis.
12. Kepada pacar terkasih Vivi Anggita yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dorongan dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktunya dan siap untuk memberikan keterangannya.
14. Untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 14 Maret 2023

GARE'GE' ARUNG ALLO

ABSTRAK

Gare'ge Arung Allo E041181319. Pengaruh Entitas gereja Toraja Terhadap Partisipasi politik Masyarakat Toraja Utara. Di bawah bimbingan Sakinah nadir dan Ummi Suci Fathia Bailusy.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pada masyarakat yang tinggal di daerah, salah satunya ada pada pengaruh yang berkembang dalam lapisan masyarakat. Sebagai contoh dalam masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan gereja, posisi lembaga gereja akan sangat tinggi ketimbang pemimpin formal yang memiliki legalitas. Dalam Masyarakat Toraja Utara proses sosial antara kristen dengan kebudayaan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkembang sehingga terbentuklah Gereja Toraja yang kehadirannya sangat berdampak terhadap tatanan sosial. Gereja Toraja telah mempengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial politik mereka. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja maka Gereja Toraja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi.

Hasil Penelitian Ini menunjukkan pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi masyarakat Toraja Utara sangatlah tinggi. Secara tidak langsung Pengaruh-pengaruh yang diberikan kepada masyarakat terbangun melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah. Dari sini juga kita dapat melihat bahwa Dalam membangun pengaruh kepada masyarakat, Gereja Toraja juga mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah itu sendiri.

Kata Kunci: Pengaruh, Entitas, Partisipasi

ABSTRACT

Gare'ge Arung Allo E041181319. *The Influence of Gereja Toraja Entities on the Political Participation of the People of Toraja Utara.* Under the guidance of Sakinah Nadir and Umami Suci Fathia Bailusy

In an effort to increase availability to people who live in the area, one of them is the influence that develops at the community level. For example, in a society whose life is influenced by church culture, the position of the church institution will be very high compared to formal leaders who have legality. In the Toraja Utara Society, the social process between Christianity and culture greatly influences the values that develop so that the Gereja Toraja is formed whose presence greatly influences the social order. The Gereja Toraja has influenced people's obedience and trust in their socio-political life. Political policies made by the government are directly related to the quality of life of church members so that the Gereja Toraja cannot be separated from the reality faced by its congregation.

The purpose of this study is to find out, describe and explain the influence of the Gereja Toraja on the political participation of the people of Toraja Utara. The research approach used in this study is a qualitative method with descriptive analysis research type. Using in-depth data collection techniques, observation and documentation.

The results of this study show that the influence of the Gereja Toraja on the participation of the people of Toraja Utara is very high. Indirectly, the influences given to the community are built through community involvement in every government policy. From this we can also see that in building influence on society, the Gereja Toraja also receives support from various parties, especially the government itself.

Keywords: Influence, Entity, Participation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Partisipasi politik.....	11
2.1.1 Definisi Partisipasi Politik.....	11
2.1.2 Konsep Partisipasi Politik.....	13
2.2 Politik dan Etika Kristen.....	17
2.3 Lembaga Sosial/Pranata Sosial.....	23
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Kerangka Berpikir.....	33
2.6 Skema Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4 Informan Penelitian.....	40

3.5	Teknik Pengumpulan Data	42
3.6	Teknik Analisi Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		46
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	46
4.1.1	Sejarah Terbentuknya Kabupaten Toraja Utara	46
4.1.2	Keadaan Demografi	48
4.1.3	Sosial Budaya	50
4.2	Gambaran Umum Gereja Toraja	52
4.2.1	Sejarah Gereja Toraja	52
4.2.2	Visi dan misi gereja toraja	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
5.1	Persepsi Gereja Toraja Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Toraja Utara.....	55
5.2	Pengaruh Entitas Gereja Toraja Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Toraja Utara	59
BAB VI PENUTUP		67
6.1	Kesimpulan	67
6.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN		73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberlakukan praktek otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pada masyarakat yang tinggal di daerah, salah satunya ada pada pengaruh yang berkembang dalam lapisan masyarakat. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.² Sehingga dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat berharap

¹ Muhammad Dafan Inanda. 2009. *Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 368

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masyarakat Hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Kehidupan masyarakat dalam suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem pengaturan hidup bagi mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Melvillie J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski bahwa Cultural Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.³ Hal ini berarti adanya kebudayaan telah memengaruhi cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi masyarakat desa

Kebudayaan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan tersebut yang cenderung lebih dihormati dibandingkan pemimpin formal. Sebagai contoh dalam masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan gereja, posisi lembaga gereja akan sangat tinggi ketimbang pemimpin formal yang memiliki legalitas jelas. Hal ini bisa kita lihat dalam kasus kontestasi politik di masyarakat Toraja Utara yaitu terjadinya Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh tokoh agama dalam suatu Lembaga gereja terhadap masyarakat sangat besar. Begitu pula halnya yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara,

³ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.149-150

calon bupati ataupun wakil bupati melakukan silaturahmi politik kepada tokoh-tokoh Gereja.⁴

Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja pada umumnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan memiliki kebudayaan yang masih berpegang teguh terhadap hal-hal mistis. Masyarakat Toraja adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme, atau biasa disebut dengan Aluk To Dolo atau agama leluhur yang diwariskan secara turun temurun pada setiap generasi. Pada awalnya masyarakat Toraja sangat mempercayai hal-hal yang berbau animisme, setiap kegiatan dilakukan menurut adat dan apabila ada yang melanggar aturan-aturan adat maka mereka akan mendapat hukuman dari para leluhur atau nenek moyang mereka. Mereka percaya bahwa agama leluhur adalah agama yang benar.

Sejak masuknya Belanda ke Toraja sejak saat itulah mereka mulai memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat Toraja. Awalnya usaha Belanda tidak terlalu mendapat respon dari masyarakat Toraja. Tetapi pada saat terjadi penyerangan dari pemberontakan DI/TII sehingga masyarakat Toraja berubah pikiran dan bersedia meminta menerima ajaran Belanda dengan syarat mereka di bantu oleh Belanda melawan pemberontakan tersebut.

⁴ Muhammad Fadli, dkk (2018). *Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015*. *Aristo*, 6(2), 301-328.

Sehingga mulai saat itu agama Kristen semakin beredar di masyarakat Toraja. sejak saat itu sampai sekarang mayoritas masyarakat Toraja beragama Kristen, ada juga sebagian yang beragama islam dan ada juga sebagian yang masih percaya pada animisme yang dikenal sebagai agama Hindu Dharma.⁵

Agama Kristen diterima masyarakat Toraja dengan dihadapkan pada kebudayaan serta adat istiadat mereka yang menyebabkan terjadinya proses sosial yang mengarah ke Akulturasi. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri⁶. Meskipun mayoritas masyarakat Toraja memeluk agama Kristen tetapi agama yang lahir dari nenek moyang leluhur mereka tetap melekat pada diri masyarakat Toraja. Dengan bersatunya Kebudayaan masyarakat toraja dengan budaya-budaya Kristen inilah yang kemudian melahirkan suatu lembaga sosial.

Lembaga sosial muncul dalam masyarakat karena adanya norma yang pada mulanya terbentuk secara tidak sengaja, lama kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Hal tersebut sebagai

⁵ Riska u. 2017. *Eksistensi kearifan local di masyarakat makale Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.*

⁶ Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta :Rineka Cipta,2002), h.247-248*

mana yang dikemukakan oleh Kuntjaraningrat dengan pranata sosial, yakni suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat⁷. Pada awalnya agama bukan merupakan sesuatu yang menjadi ukuran status seseorang. Lama kelamaan agama itu disadari oleh anggota masyarakat, maka agama itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Agama mulai dirasakan sebagai suatu yang memberi nilai dan makna dalam kehidupan, maka agama itu menjadi melembaga dalam masyarakat. Jadilah agama sebagai salah satu intitusi sosial. Sama halnya dengan kehidupan sosial masyarakat Toraja, proses sosial antara kristen dengan kebudayaan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkembang sehingga terbentuklah Gereja Toraja yang kehadirannya sangat berdampak terhadap tatanan sosial masyarakat Toraja.

Gereja Toraja lahir kepada masyarakat suku Toraja yang lebih banyak berpusat di daerah administrasi kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. dalam pertumbuhannya tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya masyarakat Toraja. Dalam kerangka demikian, Gereja Toraja di satu pihak bertanggungjawab memelihara, melestarikan, dan mengembangkan identitas masyarakat Toraja, yang memiliki karakteristik yang khusus baik

⁷ *Ibid*, h.163

dalam rangka mengisi kebhinekaan yang tunggal ika masyarakat bagi bangsa Indonesia maupun pada pihak lain terpanggil memberikan kontribusi bagi pengembangan kemanusiaan yang universal.

Gereja Toraja adalah salah satu kelompok gereja Protestan di Indonesia yang bermula di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Gereja ini adalah lembaga gereja terbesar di Sulawesi Selatan Gereja Toraja adalah hasil dan kelanjutan dari pelaksanaan hakekat gereja pada umumnya.⁸

Gereja Toraja merupakan institusi keagamaan, namun juga berwatak sosial kemasyarakatan yang tidak secara kebetulan menyangang pada dirinya sebutan Toraja. Terutama bagi masyarakat Toraja Utara yang notabenehnya dalam perpektif kebudayaan lebih kental di banding masyarakat Tana Toraja. Dengan itu tanggungjawab misi pemeliharaan, pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja dan yang memiliki karakter tersendiri. Kekentalan dan keunikan budaya masyarakat Toraja Utara tidaklah memiliki tujuan pada diri sendiri sebagai simbol keistimewaan dan prestise yang harus dipertaruhkan oleh masyarakat Toraja utara, tetapi harus diterima sebagai instrument yang berfungsi menjadi

⁸ Arrang Adiyaksa. 2015. *Keterlibatan Pendeta dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar

sarana dan strategi bagi aktualisasi hidup orang Toraja yang lebih manusiawi.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat dengan pengaruh perpaduan kebudayaan dan Kristen menjadi suatu entitas dimana kehidupan bermasyarakat di Toraja utara yang banyak berbau animisme dibatasi dengan nilai-nilai Kristen yang tertuang dalam Gereja Toraja. Gereja Toraja telah mempengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial mereka. Bukan hanya dalam masalah pemenuhan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani seperti Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah sosial politik. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja maka Gereja Toraja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya.⁹

Kemudian Dalam kerangka sistem politik, maka tindakan partisipasi politik merupakan input yang tidak terlepas dari output awal, yaitu kebijakan atau rancangan kebijakan pemerintah¹⁰. Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan

⁹ Jhon Sesken Ubis. (2013). *Peran Gmim dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010*. *Jurnal Politico*, 2(2).

¹⁰M. Imaduddin Nasution. 2010. *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Di toraja utara sendiri proses input ke pemerintah akan lebih cenderung memberi output yang tidak terlepas dari pengaruh Gereja Toraja.

Sebagai contoh ketika diadakan kontestasi electoral, Gereja Toraja secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap partisipasi sebagian besar masyarakat Toraja Utara dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi Gereja Toraja di tengah masyarakat toraja utara baik langsung maupun tidak langsung telah memberi pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat khususnya di toraja utara.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan judul penelitian sebagai berikut **“PENGARUH ENTITAS GEREJA TORAJA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TORAJA UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh entitas Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara
- 2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini, di harapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan atau sebagai literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik, khususnya topik mengenai pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara.

- 2) Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan, terkhusus mengenai pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara

- b) Pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Gereja Toraja terhadap partisipasi politik masyarakat Toraja Utara
- c) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menuraikan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penelitian.

2.1 Partisipasi politik

2.1.1 Definisi Partisipasi Politik

Dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan, masyarakat seringkali berbenturan dengan kepentingan dan kebijakan negara. Benturan tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat sosialisasi politik yang dikembangkan oleh Negara bersangkutan karena proses sosialisasi politik dapat memunculkan sebuah rangsangan politik yang pada gilirannya akan terlihat dalam sebuah partisipasi politik masyarakat¹¹.

Banyak sejumlah ilmuwan politik telah mendefinisikan partisipasi politik melalui berbagai kalimat yang berbeda-beda,

¹¹ Muhammad Dafan Inanda. 2009. *Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

seperti misalnya Samuel P Huntington mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh suatu pemerintahan¹².

Senada dengan Huntington, Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan¹³.

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa.

Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.¹⁴

¹²Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice; Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), h. 3 sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 368

¹³Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 114

¹⁴Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik; Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang: UNP Press), h.20

Melalui definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli politik tersebut, dapatlah diketahui bahwa pada dasarnya partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan suatu kebijakan, dalam menentukan dan memilih pemimpin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kelompok masyarakat.

2.1.2 Konsep Partisipasi Politik

Pada umumnya peran serta masyarakat merupakan kata lain dari istilah standar dalam ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Dalam ilmu politik partisipasi diartikan sebagai upaya masyarakat baik secara individual maupun kelompok, untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah tatanan pemerintahan. hal ini boleh terjadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik. Namun tidak jarang juga partisipasi yang dilakukan bukan karena kehendak setiap individu yang bersangkutan melainkan karena kehendak tersebut mendapat pengaruh dari berbagai arah.

Kecenderungan ke arah partisipasi politik lebih luas sesungguhnya bermula pada zaman pencerahan dan memperoleh dukungan yang sangat kuat pada zaman revolusi industri. Cara-cara yang ditempuh dalam berbagai lapisan masyarakat dalam menuntut hak mereka untuk mendapatkan partisipasi politik yang lebih luas sangatlah berbeda dengan Negara satu dan yang lainnya.

Partisipasi politik sebagai peran serta masyarakat dan demokrasi secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuat kebijakan publik, dan pengawasan proses pemerintahan di Indonesia sejak merdeka yang mengalami penurunan secara terus menerus. Namun sebagai konsep dan praktek operasional baru dibicarakan sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan untuk merealisasikan hak partisipasi politik¹⁵.

Ada tiga hal fungsi partisipasi politik yaitu menentukan kedudukan pada posisi kekuasaan, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan mengawasi proses politik. Mungkin harus disadari bersama, bahwa pada moment itulah partisipasi politik mulai dimanfaatkan sebagai mekanisme beroperasinya nilai moral di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara¹⁶.

Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, partisipasi politik dilakukan melalui kontak-kontak langsung dengan para elit dikalangan masyarakat yang ikut dalam dalam menentukan kebijakan publik. Sedangkan secara tidak langsung kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui media massa yang ada, misalnya

¹⁵ Muhammad Dafan Inanda. 2009. *Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹⁶ *Ibid.*

dengan menuliskan pikiran dan pandangan pada sebuah Koran dan majalah terhadap hal-hal yang menjadi sorotan publik.

Menurut Samuel P Huntington, peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut ¹⁷:

- a) Electoral activity, adalah segala kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu termasuk dalam kegiatan ini adalah ikut serta memberikan dana untuk kampanye sebuah partai politik, memberikan suara, mengawasi perhitungan dan pemilihan suara, dan mengajak serta mempengaruhi seseorang untuk mendukung salah satu partai.
- b) Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut, masalah tertentu.
- c) Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, baik sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.

¹⁷ Samuel P Huntington dan John M Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 17.

- d) Contracting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan langsung mendatangi maupun menghubungi lewat telepon pejabat pemerintahan maupun tokoh politik.
- e) Violence, adalah cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengerusakan. (by doing physical damage) terhadap barang atau individu.

Bentuk partisipasi yang lain adalah dengan mengikuti rapat-rapat umum dan diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik maupun kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini dapat bersifat spontan namun sering juga difasilitasi oleh organisasi politik untuk memenuhi agenda politiknya melalui keadaan seperti ini, partisipasi politik seseorang bukan didasarkan atas kesadarannya sendiri melainkan karena dimobilisasi.

Dalam masyarakat, partisipasi politik dapat berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. Landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:¹⁸

- a) Kelas: perorangan-perorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- b) Kelompok: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.

¹⁸ *Ibid.*

- c) Lingkungan (neighborhood): perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d) Partai: perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- e) Golongan (faction): perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat

2.2 Politik dan Etika Kristen

Dalam kaitan antara politik dan etika Kristen, maka Kristen telah mengajarkan kasih sebagai suatu jawaban atas segala persoalan dunia. Politik Kristen adalah politik yang secara teori, merupakan perlawanan terhadap feodalisme Yahudi, namun pada praktiknya, terkontaminasi oleh feodalisme Romawi kuno yang kemudian menjadikan lahirnya Roma Katolik. Situasi politik di saat kelahiran Yesus, dimana bangsa Yahudi di Israel dijajah oleh bangsa

Romawi, menjadikan bangsa Yahudi saat itu, terpaksa tunduk pada kekuasaan kafir. Dalam hal ini, hampir tidak ditemukan interaksi antara Yesus dengan penguasa Romawi. Akan tetapi Yesus menunjukkan sikap yang tidak terlalu keras terhadap penguasa Romawi saat itu.

Dalam Injil Markus 2: 13-17, Matius 9: 9-13 dan Lukas 5: 27-32 serta 19: 1-10, disebutkan bahwa Yesus tidak menghindari pajak bangsa Romawi, tidak menghindari tindakan para penguasa Romawi dan juga memperlihatkan sikap yang dianggap kooperatif terhadap penguasa Romawi.

Dapat disimpulkan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran perjuangan kooperatif dalam perlawanan terhadap kezaliman. Sikap Yesus yang dikatakan kooperatif terhadap penguasa Romawi inilah yang membuat umat Kristen kemudian dapat mendekati pihak penguasa Romawi di Eropa. Dengan dekatnya tokoh-tokoh Kristen dengan penguasa di Eropa, maka agama Kristen dengan mudah tersebar ke seantero Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh Dunia melalui jalan kolonisasi oleh Eropa. Kristen juga pada dasarnya tidak akan tersebar tanpa adanya hubungan antara umat Kristen dengan penguasa-penguasa Eropa abad pertama dan para penguasa Afrika yang di-Kristenkan. Mulai dari sanalah penyebaran agama Kristen dimulai. Awalnya dari Roma Katolik, kemudian

muncul Gereja Ortodox di beberapa wilayah dan akhirnya muncul Gereja Reformasi atau Protestan pada abad ke-15.¹⁹

Hubungan antara Kristen sebagai agama dan politik sebagai segi kehidupan tentu telah terjadi sejak awal kelahiran agama Kristen itu sendiri. Akan tetapi, di dunia Modern khususnya di negara barat, dimana Kristen menjadi kekuatan politik yang tidak bisa dihiraukan sama sekali, loyalitas masyarakat kepada negara, melebihi loyalitas masyarakat kepada agama dan suku bangsa. Sehingga dengan demikian, maka masyarakat Barat Kristen, terlihat lebih sekular dan nasionalis daripada masyarakat lainnya.

Iman Kristen dan politik adalah dua hal yang terpisah sejak awal lahirnya agama Kristen. Akan tetapi, lahirnya Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodox di Damasqus, Athena dan beberapa tempat lainnya, telah mengawinkan antara iman Kristen dan politik.²⁰

Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda, telah memberikan pengaruh kuat dalam hubungan antara agama dan politik. Dalam hal ini, antara kedua agama monotheistik terbesar di Indonesia dan negara. Hubungan antara Kristen dan negara diatur sedemikian rupa, demikian juga dengan Islam. Dengan demikian, maka negara yang menyatakan netral terhadap agama, tidak dapat menahan diri untuk ikut mengatur masalah keagamaan. Masalah keagamaan

¹⁹ M. Imaduddin Nasution. 2010. *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.*

²⁰ *Ibid.*

yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda antara lain adalah pendirian tempat ibadah dan izin menyebarkan agama.²¹

Etika Kristen adalah ketaatan terhadap para pemimpin gereja dan Injil. Dalam politik, ketaatan terhadap Injil dan gereja ini memiliki peran penting yang sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin negara. Santo Ambrosius, guru dari Santo Agustinus, pernah menyatakan bahwa para raja seharusnya meminta restu dan keberkatan kepada Paus di Roma.²²

Dengan hadirnya etika kristen di dunia tentu memiliki dasar kuat dalam memberikan pencerahan dalam pengaturan tata perilaku dan norma dalam masyarakat. Hubungan antara etika Kristen dan politik dalam Kekristenan kita adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan analisa akal budi dan keputusan batin akan hal yang baik dalam bidang politik agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian etika Kristen dalam politik tidak berhak atau tidak berkuasa atau tidak bertugas untuk mengucapkan firman Tuhan, tetapi menjadi petunjuk yang sederhana dan mengarahkan supaya semua negara dan bangsa harus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya.²³

²¹Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Indlansche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 162-198.

²²Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.72.

²³Fransiska, Ni Nyoman. "Entitas Gereja Dalam Berpolitik Di Indonesia (Tinjauan Sudut Etika Kristen)." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* (2018): 1-15.

Sementara Santo Agustinus sendiri, memiliki konsep negara Tuhan dan negara iblis atau negara duniawi. Negara Tuhan, adalah negara yang didasarkan kepada cinta kasih Tuhan. Dimana cinta kasih ini menjadi perekat persatuan antar warga negara. Sedangkan negara iblis atau negara duniawi adalah negara yang didasarkan kepada cinta kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka Santo Agustinus menginginkan adanya Persemakmuran Kristen sebagai bentuk pemerintahan.²⁴

Sikap dan pandangan politik Agustinus ini, memperlihatkan bahwa antara ajaran Kristen dengan politik sebenarnya terdapat hubungan yang tidak begitu erat.

Dalam hal ini, pandangan politik Agustinus sangat mempengaruhi sebagian besar pandangan politik para paus di Vatikan dan sebagian umat Islam yang ingin menegakkan khilafah Islamiah. Sikap Agustinus tentang negara juga didukung oleh John Calvin. Calvin memiliki pandangan bahwa pemerintah harus menghormati gereja. Sehingga negara dapat berjalan di bawah rahmat Tuhan. Sedangkan mengenai nasionalisme, Martin Lutherlah orangnya, yang memberikan sumbangsih besar terhadap konsep nasionalisme Kristen. Luther membatasi wewenang negara dan gereja, dengan memberikan fungsi yang berbeda untuk keduanya.

²⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 79-89.

Gereja menurut Luther bukanlah penguasa negara. Sedangkan raja adalah penguasa negara yang sebenarnya.

Nasionalisme Kristen, inilah yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Eropa dan Amerika serta negara bermayoritas Kristen, dan non Muslim, lebih bersifat nasionalis dan lebih mementingkan urusan negara daripada urusan pribadi dan kelompok. Disini jelas tersirat bahwa nasionalisme Kristen lebih banyak memberikan pengaruh positif bagi kemajuan sebuah negara. Ini terlihat dari kenyataan bahwa negara bermayoritas Kristen di Eropa dan Amerika lebih maju dan lebih memperlihatkan integritas bangsa yang kuat.

Dampak dari pemikiran politik Protestan inilah yang kemudian memperkuat nasionalisme Kristen di Eropa dan Amerika. Agama Kristen Protestan atau Gereja Reformasi, merupakan sumber dari berkembangnya sekularisme dan nasionalisme yang sangat kuat. Inilah mengapa masyarakat barat modern, lebih memilih untuk membela negara daripada agama. Masyarakat barat modern yang mayoritas Kristen Protestan, lebih banyak mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan suku dan agamanya, karena adanya perintah Injil, untuk memberikan hak kaisar kepada kaisar dan hak Tuhan kepada Tuhan.

Sehingga nasionalisme sekular berkembang pesat dalam dunia Kristen. Dalam hal pengaruh tokoh-tokoh Kristen terhadap politik Kristen, maka tidak dapat diperkirakan berapa sebenarnya

jumlah tokoh pemikir politik Kristen didunia. Santo Agustinus dan Martin Luther hanyalah sebagian kecil dari pemikir politik yang terpengaruh oleh ajaran Yesus.

Pengaruh besar Yesus antara lain terlihat dari ajaran untuk membela kaum tertindas. Gerakan politik yang dilakukan Yesus adalah gerakan politik yang melawan pemerintahan Imperium Romawi dan membela kelompok tertindas di tanah Palestina.²⁵

Yesus juga mengajarkan tentang egalitarianisme dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini terlihat dari perintahnya untuk menanggalkan kekayaan dan mengikuti ajarannya. Doktrin Kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus pada dasarnya adalah akomodasi bagi aspirasi kelas menengah kebawah dan tertindas. Dengan demikian, maka Yesus menginginkan adanya upaya pemeliharaan cinta dan kasih bagi rakyat miskin dan yang tidak terakomodir secara politik dan sosial.²⁶

2.3 Lembaga Sosial/Pranata Sosial

Lembaga sosial dalam bahasa Inggris dikenal dengan *social-institution*, atau diterjemahkan juga sebagai pranata sosial. Pranata sosial adalah merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. menurut

²⁵ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, h.54-56.

²⁶ *Ibid*, h. 61

Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.²⁷

Lembaga sosial umumnya didirikan sejalan dengan nilai dan norma dalam lapisan masyarakat, kepada mewujudkan nilai sosial, warga menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekumpulan norma akan membentuk sebuah sistem. Inilah permulaannya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah berproses pelaksanaan ke dalam institusi menghasilkan lembaga sosial.

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul *Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial (General Features of Social Institution)* menguraikan sebagai berikut:²⁸

1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-

²⁷ Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta :PT Rineka Cipta,2002), h.164

²⁸ *Ibid*, h.184

kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.

2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain.

Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut:²⁹

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga sosial adalah:

1. Fungsi Manifes atau fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh masyarakat.
2. Fungsi Laten atau fungsi terselubung yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

²⁹ Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.173

Institusi/lembaga sosial lahir dan terdapat dalam masyarakat tanpa mengenal tingkat kebudayaannya, apakah tarap kebudayaan yang masih bersahaja atau kebudayaan moderen. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar atau pokok yang muncul dengan sendirinya. Untuk memenuhi kebutuhna kebutuhan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga. Misalnya kebutuhan akan pendidikan, lahirlah lembaga pendidikan, seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya. Kebutuhan hidup kekerabatan, melahirkan lembaga kemasyarakatan, seperti perkawinan, kebutuhan menyatakan keindahan, melahirkan kesusasteraan, seni, dan sebagainya. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa institusi sosial merupakan sesuatu yang lahir disebabkan karena manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia tidak bisa seorang diri, melainkan membutuhkan kerjasama dengan orang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan kumpulan norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka di dalam suatu masyarakat terdapat berbagai lembaga sosial, yang didasarkan pada jenis kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pemenuhan bersama, maka semakin banyak pula lembaga/institusi sosial yang lahir dalam masyarakat itu.

Lembaga sosial muncul dalam masyarakat karena adanya norma yang pada mulanya terbentuk secara tidak sengaja, lama kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, norma (ukuran) tentang pendidikan. Pada awalnya pendidikan bukan merupakan sesuatu yang menjadi ukuran status seseorang. Lama kelamaan pendidikan itu disadari oleh anggota masyarakat, maka pendidikan itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pendidikan dirasakan sebagai suatu yang memberi status, maka pendidikan itu menjadi melembaga dalam masyarakat. Jadilah pendidikan sebagai salah satu intitusi sosial. Demikian halnya dengan agama, khususnya agama budaya (ardhi). Pada awalnya agama bukan merupakan sesuatu yang menjadi ukuran status seseorang. Lama kelamaan agama itu disadari oleh anggota masyarakat, maka agama itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Agama mulai dirasakan sebagai suatu yang memberi nilai dan makna dalam kehidupan, maka agama itu menjadi melembaga dalam masyarakat. Jadilah agama sebagai salah satu intitusi sosial³⁰.

Dalam konteks riset ini lembaga sosial hadir memberi pengarahan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial secara langsung atau tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya

³⁰ Sulaiman Saat. "Agama Sebagai Institut (Lembaga) Sosial". Kajian Sosiologi Agama. Vol V. Nomor 2. (2016). 267

dalam segi sosial politik khususnya dalam melihat partisipasi politik masyarakat. Lembaga sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah Gereja. Nilai-nilai Kristen dapat tumbuh dalam suatu kelompok masyarakat akan tetapi tidak bisa dilepas dari akar kebudayaan masyarakat itu sendiri. Seperti di masyarakat Toraja Utara dimana nilai-nilai Kristen berbaur dengan kebudayaan yang berpadu memberi pengaruh bagi masyarakat dalam suatu Lembaga sosial yakni Gereja Toraja.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini tidak ada penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai Gereja Toraja dalam mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat, namun ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga berperan penting dalam membantu peneliti membangun argumen dalam penelitian ini, sebab penelitian ini memerlukan pembandingan dalam mengkaji masalah hingga penarikan kesimpulan. Berikut merupakan telaah Pustaka berupa skripsi dan jurnal yang menjadi bahan pertimbangan dan pendukung dalam menyusun karya tulis ini :

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Dafan Inanda dengan judul Skripsi *Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)*. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi

ini, menemukan bahwa Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sangat tinggi. Data yang mendukung kesimpulan ini adalah mayoritas pilihan responden tentang siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik adalah ulama. Hal ini disebabkan karena ulama adalah seseorang yang berilmu dan orang yang dekat dengan Tuhan (ahli zikir) sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan sangat penting sebagai panutan agama dan ulama sebagai orang yang patut ditauladani juga sangat tinggi, akan tetapi pengaruh ulama semakin menurun atau tidak penting dalam panutan politik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Kraksaan yang tidak setuju mengenai pernyataan bahwa ulama perlu diikuti bukan hanya untuk masalah agama tetapi juga untuk masalah politik³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Imaduddin Nasution dengan judul Skripsi "*Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*". Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa Dalam memperjuangkan hak-hak konstituennya PDS selalu mengatasnamakan kemanusiaan dan pluralisme serta memperlihatkan sikap yang keras dalam menolak

³¹ Muhammad Dafan Inanda. 2009. *Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

syariah dalam bentuk undang-undang. PDS dalam hal ini selalu memberikan protes kepada pemerintah dan kelompok mayoritas yang dianggapnya melakukan diskriminasi terhadap minoritas Kristen dan non Muslim pada umumnya.

Pengaruh PDS tidaklah besar. Pengaruh PDS hanya sebatas kepada semakin bersemangatnya umat Kristen Indonesia dalam memperjuangkan hak konstitusional mereka, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika kita bertanya tentang pengaruh PDS terhadap pemerintah Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun keberadaannya di DPR RI, PDS telah mempersulit banyak rancangan undang-undang yang memiliki muatan atau berbau Syariat Islam.³²

3. Penelitian yang dilakukan Jhon Sesken Ubis dengan judul jurnal *“Peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada Pilkada di kabupaten Minahasa selatan Tahun 2010”*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, bahwa Peran Gereja Masehi Injili di Minahasa khususnya GMIM Kalvari Kapitu dalam meningkatkan partisipasi politik telah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat dirasakan melalui program pelayanan jemaat, seperti

³² M. Imaduddin Nasution. 2010. *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.*

pendidikan warga gereja yang berkaitan dengan politik dan kewarganegaraan.

Dari beberapa rujukan diatas, jelas sekali letak persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Persamaan yang paling mendasar yaitu dalam tujuan penelitian yang berbicara tentang bagaimana suatu Lembaga dalam memberi pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Teori yang digunakan juga terdapat beberapa persamaan yaitu teori partisipasi politik. Kemudian dari hasil riset yang dilakukan dari beberapa penelitian diatas sama-sama melihat pengaruh terhadap partisipasi politik dalam suatu masyarakat dan diharapkan penelitian ini nantinya memberi hasil yang optimal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam tujuan penelitian terletak pada studi kasus dimana penelitian terdahulu hanya fokus dalam jenis partisipasi electoral atau pemilihan umum. Dalam penggunaan teori partisipasi politik, penelitian lebih signifikan dengan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Kemudian hasil yang didapat tentunya berbeda karena beberapa penelitian terdahulu bertolak ukur pada meningkatnya partisipasi politik dalam suatu kontestasi elektoral.

Selain perbedaan tujuan, teori serta hasil penelitian, metode penelitian terdahulu dengan penelitian ini juga memiliki banyak perbedaan, yaitu lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di

Kabupaten Toraja Utara. Watak serta pandangan dalam masyarakat tentu memberi dampak dari pengaruh yang berkembang. Perbedaan lainnya terletak pada informan penelitian dimana penelitian ini menggali informasi dari suatu lembaga gereja. adapun persamaan yang tidak jauh berbeda dari metode penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis dan tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.³³

2.5 Kerangka Berpikir

Gereja Toraja lahir kepada masyarakat suku Toraja yang lebih banyak berpusat di daerah administrasi kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. dalam pertumbuhannya tidak dapat dilepaskan dari akar akar budaya masyarakat Toraja. Dalam kerangka demikian, Gereja Toraja di satu pihak bertanggungjawab memelihara, melestarikan, dan mengembangkan identitas masyarakat Toraja, yang memiliki karakteristik yang khusus baik dalam rangka mengisi kebhinekaan yang tunggal ika masyarakat bagi bangsa Indonesia maupun pada pihak lain terpanggil memberikan kontribusi bagi pengembangan kemanusiaan yang universal.

Gereja Toraja meskipun merupakan institusi keagamaan, namun juga berwatak sosial kemasyarakatan yang tidak secara kebetulan menyandang pada dirinya sebutan Toraja. Terutama bagi

³³ Jhon Sesken Ubis. (2013). *Peran Gmim dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 20101*. *Jurnal Politico*, 2(2).

masyarakat Toraja Utara yang notabeneanya dalam perpektif kebudayaan lebih kental di banding masyarakat Tana Toraja.

Dengan pengaruh perpaduan kebudayaan masyarakat toraja dan Kristen yang tertuang dalam Gereja Toraja, telah memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial mereka. Bukan hanya dalam masalah pemenuhan kebutuhan seperti Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam dinamika politik di kabupaten toraja utara. Sebagai contoh ketika diadakan kontestasi electoral, Gereja Toraja secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap partisipasi sebagian besar masyarakat toraja utara dalam menentukan pilihannya.

Kemudian Dalam kerangka sistem politik, maka tindakan partisipasi politik merupakan input yang tidak terlepas dari output awal, yaitu kebijakan atau rancangan kebijakan pemerintah³⁴. Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Di toraja utara sendiri proses input ke pemerintah akan lebih

³⁴M. Imaduddin Nasution. 2010. *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

cenderung memberi output yang tidak terlepas dari pengaruh Gereja Toraja.

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang pengaruh suatu entitas sekaligus sebagai intitusi (Lembaga Sosial) terhadap partisipasi masyarakat Toraja Utara khususnya pengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam demokrasi dan turut serta dalam pembuatan kebijakan.

2.6 Skema Penelitian

